

**PENANGANAN KRISIS PENGUNGSI KONFLIK ETHIOPIA-TIGRAY
OLEH UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES
(UNHCR)**

Oleh : Lulu Dwivinanti

Pembimbing: Tuah Kalti Takwa, S.H., M.H

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Back in 2020, there was a civil war between the Federal government of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front (TPLF) that led to a six-month state of emergency. The crux of the conflict lies in different political ideologies. UNHCR provides humanitarian assistance, protection, and coordination with the main target of internally displaced persons (IDPs) in Ethiopia. The author uses qualitative research methods and employs Clive Archer's theory of the role of international organisations to assess how the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) handled the internally displaced persons (IDPs) in the Ethiopia-Tigray conflict.

The findings of this study show that UNHCR actively carries out its role as an international organisation in handling internally displaced persons affected by the Ethiopia-Tigray conflict as actors. UNHCR directly uses its implementation on most of the aid activities for IDPs. UNHCR not only serves as an ally to UN states, but also develops and implements prevention strategies and solutions to internal crises, addressing challenges such as unstable food conditions and limited resources.

UNHCR prioritises meeting the needs of internally displaced Ethiopians by moving shelters, delivering Core Relief Items (CRIs), and providing humanitarian assistance, which includes daily living needs such as non-food items. UNHCR has final responsibility in its role as an operational actor, directly utilising its implementation on most relief activities for IDPs in the Ethiopia-Tigray conflict.

Keywords: UNHCR, Ethiopia-Tigray Conflict, Internally Displaced Person (IDPs)

PENDAHULUAN

Negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali negara yang berada di Benua Afrika dihadapkan oleh permasalahan pengungsi. Ethiopia memiliki sejarahnya yang panjang sebagai negara merdeka tertua yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Negara ini mengadopsi konsep etno-nasionalisme yang menyatakan bahwa hampir setiap kelompok etnis memiliki wilayah sendiri untuk ditempati.¹

Pada tahun 2020, Ethiopia menghadapi perang saudara yang melibatkannya dengan Tigray. Inti permasalahan dari konflik ini terletak pada perbedaan ideologi politik antara pemerintah Federal Ethiopia dan *Tigray People's Liberation Front* (TPLF). Konflik ini dilatar belakangi oleh transisi politik pemerintahan dengan diangkatnya Perdana Menteri Ethiopia yang berasal dari Etnis Oromo, Abiy Ahmed, yang akhirnya melengserkan kekuasaan dari Etnis Tigray dari beberapa posisi penting di militer dan kabinet.

Pada hakikatnya, indentitas etnis telah menjadi faktor penting dalam perebutan kekuasaan pemerintahan Ethiopia.² *Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front* (EPRDF) merupakan partai yang memegang pemerintahan selama

kurang lebih 30 tahun. Salah satu partai politik dengan kekuatan terbesar dan paling menonjol di Ethiopia adalah *Tigray People's Liberation Front* (TPLF).³ Selama lebih dari seperempat abad, partai ini telah mengendalikan politik negara Ethiopia dengan prestasi menggulingkan rezim militer *Derg* yang berkuasa sebelumnya.

Abiy Ahmed menjadi pemimpin pertama yang berasal dari Partai Demokrat Oromo (ODP) dan menunjukkan tekadnya untuk melakukan reformasi politik, rekonsiliasi, dan persatuan. Dalam 100 hari pertama menjabat, Abiy telah menurunkan pemimpin militer dan sipil yang diduga korupsi, memberikan amnesti kepada ribuan tahanan politik, meningkatkan pengaruh perempuan dalam kehidupan politik dan masyarakat, melegalkan kelompok oposisi yang dilarang, dan mencabut keadaan darurat negara.⁴

Pada September 2020, pemilihan umum yang seharusnya ditunda karena Covid-19 tetap dilaksanakan oleh Tigray secara sepihak dengan hasil 98% kursi TPLF dan 2% kursi pemerintah Federal Ethiopia. Oleh karena itu, bagi Tigray pemerintahan federal sudah berakhir

¹ Kementerian Luar Negeri Indonesia, "Ethiopia," accessed November 29, 2023, <https://kemlu.go.id/addisababa/id/pages/ethiopia/62/etc-menu>.

² Aregawi Berhe, *A Political History of the Tigray People's Liberation Front (1975-1991)*, (Amsterdam: Tsehai Publishers & Distributors, 2009), 1.

³ Felix Makonye, "The Federal Democratic Republic of Ethiopia's War with the Tigray Region: History, Causes of War, Humanitarian Crisis and Mitigation Measures to Stem Conflict," *Journal of Nations-building & Policy Studies (JoNPS)* 6, No. 1 (2022): 74.

⁴ Matina Stevis Gridneff, "Nobel Peace Prize Awarded to Abiy Ahmed, Ethiopian Prime Minister," *New York Times*, accessed December 7, 2023, <https://www.nytimes.com/2019/10/11/world/afrika/nobel-peace-prize.html>.

pada Oktober 2020. Namun tentu saja di sisi lain, pemerintahan Ahmed memandang pemilihan umum ini tidak sah dan ilegal karena dilakukan secara mandiri oleh Tigray.

Pemerintah federal mengurangi dukungan anggaran ke wilayah tersebut karena sengketa pemilu, dan pemerintah daerah Tigray menyatakan bahwa pemerintah federal tidak memiliki otoritas hukum. Akibatnya, pemerintah federal dan regional mulai mempertanyakan legitimasi masing-masing.⁵ Kemudian pasukan militer TPLF meluncurkan serangan dan berusaha melakukan pencurian senjata di pangkalan militer pemerintah federal di Tigray yang dipicu oleh kedatangan pasukan federal beberapa waktu sebelumnya.⁶

Stabilitas Ethiopia pun mulai terguncang semenjak serangan darat dan udara pertama diluncurkan tak lama setelah bentrokan pertama pada tanggal 7 November 2020. Pemerintah Ethiopia mengeluarkan *state of emergency* selama enam bulan untuk melindungi warga sipilnya. Dalam hal ini, diantaranya ialah pembatasan akses informasi serta pemadaman komunikasi internet. Tak membutuhkan waktu yang lama untuk konflik di wilayah Tigray ini naik menjadi konflik regional. Diyakini ada keterlibatan militer Eritrea,

⁵ Lauren Ploch Blanchard, *Ethiopia's Transition and the Tigray Conflict* (Report No. R46905), (Congressional Research Service, 2021), 5.

⁶ Venisa Yunita Sari et al., "Implementasi Rezim Internasional dalam Menangani Conflict-Related Sexual Violence di Tigray," *Intermestic: Journal of International Studies* 7, no. 1 (2022): 164.

Somalia, dan Amhara sejak awal namun dibantah oleh pihak Ethiopia dan Eritrea. Pasukan militer luar ini akhirnya ditarik mundur berkat desakan dari *United Nations* (UN) dan Amerika Serikat.

Kekuatan gabungan militer tentara Tigray yang berada di bawah kepemimpinan partai TPLF terdiri dari pasukan *Tigray Defence Force* (TDF), milisi, dan polisi daerah yang diperkirakan mencapai 250.000 orang dengan dukungan penuh oleh enam juta penduduk Tigray. Setelah serangan di pangkalan militer oleh TPLF tersebut, memaksa pemerintahan federal ke dalam konfrontasi militer. Perdana Menteri Abiy menyatakan pada 4 November 2020, operasi militer di Tigray telah dimulai. Pemerintahan federal menyebut tindakan militer dilandaskan oleh "*law enforcement operations*" atau "operasi penegakan hukum" dan menyatakan serangan *Tigray People's Liberation Front* (TPLF) sebagai pengkhianatan tingkat tinggi.

Perperangan antara pemerintah federal dan pasukan militer TPLF pada akhirnya tak hanya memengaruhi kedua pihak saja, namun juga warga negara Ethiopia, khususnya Tigray. Pada beberapa minggu pertama pertempuran, ribuan orang meninggal dunia dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ketegangan politik federal dan regional Ethiopia saat ini sedang berkembang menjadi konflik kekerasan yang lebih besar, yang memicu gelombang perpindahan

internal.⁷ PBB telah mengeluarkan peringatan akan resiko tinggi genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis di Ethiopia.⁸

UNHCR menetapkan 59.759 pengungsi sebagai titik awal jumlah pengungsi yang tercatat di Tigray pada awal krisis berlangsung.⁹ *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) melaporkan bahwa sekitar 2,1 juta orang telah mengungsi akibat konflik di Tigray, 250.000 orang di wilayah Amhara, dan 112.000 orang di wilayah Afar. Sebanyak 46.500 orang mencari suaka dan perlindungan internasional di Sudan.¹⁰

Pada September 2023, total terdapat 3.459.881 pengungsi internal yang tersebar di 2.544 lokasi Ethiopia yang mana sebanyak 2.237.195 orang mengungsi dengan alasan konflik, 612.250 orang lainnya mengungsi karena kekeringan dan sisanya karena ketengangan sosial sebanyak 324.302 orang.

Konflik Ethiopia-Tigray mempunyai beberapa dimensi dan fenomena yang menarik untuk diteliti, diantaranya adalah krisis kemanusiaan dan kompleksitas identitas etnis. Tingginya kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi selama perang saudara ini memaksa jutaan orang

mengungsi dan memerlukan bantuan kemanusiaan secepat mungkin. Akan tetapi sering kali akses bantuan tersebut dihalangi selama pertempuran berlangsung.

Melihat kondisi ini, UNHCR sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang pengungsi akhirnya merespon dengan memberikan bantuan terhadap pengungsi yang mengamankan diri dari konflik Ethiopia-Tigray. Ethiopia memang telah mengalami perubahan yang luar biasa sejak Abiy Ahmed dilantik menjadi Perdana Menteri. Akan tetapi, pemberontakan dan konflik terutama antara pemerintah federal dan *Tigray People's Liberation Front* (TPLF), telah menjerumuskan Ethiopia ke dalam perang saudara.¹¹ Hal ini akan membuka deretan permasalahan baru yang muncul sebagai akibat dari pecahnya perang. Salah satu masalah utama yang menjadi perhatian penulis adalah pengungsi Ethiopia, khususnya pengungsi internal yang tersebar di daerah Ethiopia Utara yaitu, Afar, Amhara, dan Tigray.

Melihat dampak konflik bersenjata yang melibatkan Ethiopia dan Tigray ini meluas dengan semakin tingginya jumlah pengungsi setiap harinya. Dalam hal ini konflik ini dipandang sebagai krisis internasional karena telah membuat 2,5 juta orang mengungsi dari wilayah Tigray dan lebih dari 60.000 orang melarikan diri melintasi perbatasan ke Sudan sejak Maret 2021. Kondisi

⁷ Kyana Burgess, "Intent and Impact: How State and International Policy Affects Internally Displaced Person in African Countries," *Spectrum* 10, No. 1 (2021): 10.

⁸ Lauren Ploch Blanchard, *The Unfolding Conflict in Ethiopia* (Report No. TE10058), (Congressional Research Service, 2020), 6.

⁹ UNHCR, "Tigray Situation Update," 2021.

¹⁰ OCHA, "Ethiopia-Tigray Region Humanitarian Update," 2021.

¹¹ Thea Forsen, "Protest and Political Change in Ethiopia: The Initial Success of the Oromo Qeerroo Youth Movement," *Nordic Journal of African Studies* 30, No. 4 (2021): 15.

tersebut yang membuat UNHCR mengambil peran aktif sebagai aktor dan menjadi pemimpin dalam memberikan bantuan berupa perlindungan, bantuan darurat serta akses kemanusiaan yang diperlukan oleh para pengungsi.

KERANGKA TEORI

Perspektif Neoliberalisme

Neoliberalisme didasarkan pada pemahaman tentang realitas lanskap politik dan ekonomi global, yang pada dasarnya sangat instruktif secara fundamental dengan distribusi kekuasaan dan kesejahteraan global secara signifikan dipengaruhi oleh aktor non-negara seperti organisasi internasional, MNC, IGO, dan NGO.

Perspektif ini menganggap lembaga-lembaga sebagai fasilitator dan instrumen untuk membina kerja sama antar entitas dalam kerangka internasional. Pada konteks ini dapat mencakup organisasi internasional resmi yang mewakili pemerintah serta menetapkan pedoman, konvensi, dan perjanjian yang memfasilitasi hubungan internasional. Terdapat empat asumsi dasar neoliberalisme menurut Steven Lamy,¹² yaitu:

1. Pada hubungan internasional, meskipun negara bertindak sebagai aktor utamanya, namun bukan berarti menjadi satu-satunya entitas yang berpengaruh. Negara bertindak secara rasional dan instrumental pada dasarnya bertujuan untuk memajukan kepentingannya.

2. Melalui kerja sama, negara mengejar keuntungan mutlak dimana perilaku rasional mendorong mereka untuk mencari nilai yang lebih besar secara kolaboratif. Negara mempunyai kecenderungan tidak tertarik mengenai keuntungan negara lain dari perjanjian tersebut.
3. Kecurangan dan ketidakpatuhan adalah penghalang utama kesuksesan kerja sama. Maka dari itu, peran organisasi internasional sangat penting tidak hanya untuk memastikan kepatuhan namun juga untuk mencegah kecurangan.
4. Meskipun kerja sama tidak lepas dari tantangan, negara-negara akan mengalokasikan loyalitas dan sumber daya mereka kepada lembaga-lembaga jika terbukti saling menguntungkan, terutama jika lembaga-lembaga ini meningkatkan prospek untuk mengamankan kepentingan nasional secara global.

Level Analisis

Untuk memahami proses pengembangan teori, perlu menentukan level analisis dalam studi hubungan internasional. Ada lima level analisis yang dikemukakan oleh Mohtar Mas'ood, yaitu individu, kelompok individu, negara-bangsa, kelompok negara-bangsa, dan sistem internasional. Para peneliti yang memprioritaskan analisis pada tingkat kelompok berpendapat bahwa individu, pada umumnya, terlibat dalam tindakan internasional sebagai bagian dari suatu kelompok.

Hubungan internasional, pada dasarnya, memerlukan interaksi antara

¹² Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional*, (Surabaya: Cakra Global Strategis, 2016), 112-113.

kelompok-kelompok kecil yang beragam di negara-negara yang berbeda. Akibatnya, peristiwa-peristiwa internasional dipengaruhi bukan oleh individu saja, melainkan oleh kelompok-kelompok kecil (seperti kabinet dan dewan penasihat keamanan) serta organisasi, birokrasi, departemen, lembaga pemerintah, dan sejenisnya. Oleh karena itu, memahami hubungan internasional memerlukan pemeriksaan terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh kelompok-kelompok kecil dan organisasi-organisasi yang mengambil bagian dalam bidang hubungan internasional.¹³

Teori Peran Organisasi Internasional

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori peran organisasi internasional. Menurut Mohtar Mas'oeed, teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Teori merupakan pernyataan yang menghubungkan ide-ide logis untuk menciptakan penjelasan yang paling umum tentang mengapa hal-hal terjadi dan saling berhubungan.

Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, memaparkan peran utama organisasi internasional dalam melakukan fungsinya di sistem politik internasional, yakni sebagai instrumen, arena, dan aktor.¹⁴

¹³ Mohtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 46.

¹⁴ Clive Archer, *International Organizations*, 3rd ed. (London: Routledge, 2001), 68.

1. Organisasi internasional sebagai instrumen

Persepsi yang paling umum tentang fungsi organisasi internasional mungkin adalah alat yang digunakan negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini terutama berlaku untuk IGO, seperti UNHCR. Dimana anggotanya adalah negara berdaulat yang mempunyai otoritas yang dapat membatasi tindakan independent organisasi internasional. Maka dari itu, organisasi internasional sebagai sebuah instrument sering kali digunakan sebagai sarana atau alat dalam menghubungkan kepentingan nasional suatu negara.

2. Organisasi internasional sebagai arena

Organisasi internasional dalam perannya sebagai arena ialah platform atau tempat dimana hal-hal terjadi. Forum ini merupakan ruang netral yang dapat digunakan para anggotanya untuk berdiskusi, bekerja sama, bahkan saling menolak. Negara-negara disediakan arena untuk mendiskusikan dan menunjukkan tujuan mereka di forum publik sehingga mampu membuka perspektif yang lebih luas mengenai suatu masalah. Berkat hal ini, negara-negara kecil akan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk menyuarakan kepentingan mereka.

3. Organisasi internasional sebagai aktor

Peran ketiga dari organisasi internasional dalam sistem internasional adalah aktor independen, yang artinya memiliki kemampuan untuk bertindak secara mandiri tanpa

terpengaruh oleh kekuatan eksternal. Umumnya badan dalam organisasi yang membuat keputusan untuk melakukan ini. Ketika sebuah organisasi internasional berperan sebagai aktor, salah satu ciri utamanya adalah tindakan pemerintah negara anggota yang berbeda dari biasanya.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁵ Data penelitian ini menggunakan data sekunder berupa jurnal, buku, artikel, data dari berbagai situs resmi, atau media massa elektronik kredibel yang membahas isu atau fenomena yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, penulis akan berupaya untuk menjelaskan suatu kasus fenomena sosial melalui analisis berdasarkan sumber data yang tersedia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penanganan Pengungsi Terdampak Konflik Ethiopia-Tigray Oleh *United Nations High*

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

Commissioner for Refugees (UNHCR)

a. Kerjasama Pemerintah

United High Commissioner for Refugees (UNHCR) menjalin hubungan kemitraan dengan pemerintahan Ethiopia sejak lama, khususnya dengan *Refugee and Returnee Service (RRS)*. UNHCR membantu pemerintah Ethiopia dalam membuat rencana terkait dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk respon pengungsi. Menyusul dukungannya terhadap *Global Compact on Refugees (GCR)* pada 2018, Ethiopia menegaskan kembali dedikasinya dengan memberlakukan Proklamasi Pengungsi baru, yang memperluas berbagai hak tambahan bagi para pengungsi. Selain itu, Ethiopia memperkenalkan kebijakan suaka dan berkomitmen pada program pengungsi global.

Dinamika, kompleksitas, dan kesulitan khusus dari berbagai keadaan di Ethiopia terus memiliki pengaruh signifikan pada upaya pemerintah, UNHCR, dan mitra untuk memberikan bantuan, perlindungan dan solusi bagi para pengungsi. Terlepas dari dedikasi pemerintah dalam memastikan perlindungan dan dukungan, konflik yang telah berlangsung di Ethiopia Utara sejak 2020 berdampak langsung pada lingkungan perlindungan baik itu masyarakat setempat dan para pengungsi.

Situasi ini menempatkan batasan kemampuan kelembagaan dalam mempertahankan respon berkelanjutan terutama mengingat fakta bahwa intervensi darurat bersama akan semakin membatasi sumber daya

yang sudah terbatas sejak awal. Konflik ini memaksa relokasi ribuan pengungsi ke daerah Ethiopia yang lebih aman, mereka membutuhkan pembangunan fasilitas, infrastruktur dan penyediaan layanan baru.

Menutupi kebutuhan kemanusiaan yang paling mendesak adalah tujuan utama dari respons saat ini demi pengungsi internal. Infrastruktur yang kuat dan inklusif sebagai solusi berkelanjutan diperlukan dalam mewujudkan rencana tindakan komprehensif di tingkat regional. Hal ini diperlukan demi tercapainya solusi jangka panjang bagi sejumlah besar orang yang baru dipindahkan atau dalam keadaan perpindahan yang berkepanjangan.

Pemerintah Ethiopia didukung oleh *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, *International Organization for Migration (IOM)*, dan *United Nations Development Programme (UNDP)* melibatkan kementerian kehakiman dan perdamaian serta *Ethiopian Disaster Risk Management Commission (EDRMC)* bertanggung jawab merancang solusi jangka panjang.

Populasi pengungsi perkotaan meningkat dua kali lipat akibat ribuan orang meninggalkan zona konflik di bagian utara secara independen. Hal ini telah memberikan tekanan pada sistem dukungan kemanusiaan yang sudah terbatas, meliputi dokumentasi, pendataan, dan layanan perlindungan penting lainnya.

Forum koordinasi yang terbentuk seperti *Refugee*

Coordination Group (RCG) disesuaikan dengan *Refugee Coordination Model* berisikan kelompok kerja sektoral nasional dan regional, mitra lokal, donor, badan PBB dan *refugee-led organization*.¹⁶ Setiap dua bulan, RCG akan mengadakan pertemuan untuk membicarakan strategi dan masalah lintas sektoral. Perlindungan, pendidikan, tempat tinggal, energi lingkungan, dan pekerjaan merupakan struktur koordinasi lapangan yang memastikan bahwa mitra secara efektif mengelola kemajuan dan masalah operasional.

RRS yang didanai oleh UNHCR bertanggung jawab dalam memimpin pengungsi di Ethiopia, termasuk pengungsi terdampak konflik Ethiopia-Tigray. Selain pengungsi, pemerintah baru-baru ini mengusulkan agar RRS juga membuat rencana dan program untuk IDP. Proposal baru-baru ini memberikan kesempatan bagi UNHCR untuk memperkuat kolaborasi dengan RRS dalam inisiatif respon IDP.

Kerja sama lembaga pembangunan PBB memperkuat hubungan kemitraan seiring dengan penyertaan pengungsi ke *United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF)* sesuai dengan kesepakatan pemerintah Ethiopia periode 2020-2025. Pertemuan bulanan akan diadakan oleh empat kelompok kerja di bawah Kantor Koordinator Penduduk, yaitu

¹⁶ UNHCR and Refugees and Returnees Service (RRS), *Ethiopia Country Refugee Response Plan, January - December 2023* (2023), 17.

Governance & Peacebuilding, Social Service Delivery, Resilience to Climate Change & Disasters, dan Economic Recovery & Inclusive Growth. Setelah meninjau operasi UNHCR dan pertemuan dengan pejabat tinggi pemerintah pada akhir Januari 2021, Komisaris Tinggi mendorong reorganisasi segera dan memperkuat kehadiran lapangan UNHCR, termasuk bantuan untuk pengungsi internal.

Pada November 2022, relokasi pengungsi pertama yang menyertai kamp-kamp Mai Tsebri di Tigray ke wilayah Amhara sejak pecahnya konflik dua tahun sebelumnya difasilitasi oleh kerja sama UNHCR dengan RRS Ethiopia. Pada operasi ini, UNHCR berhasil memindahkan 7.000 orang pengungsi dan sekitar 22.300 pengungsi ditempatkan di fasilitas Alemwach pada akhir tahun.

Pada umumnya, pengungsi akan mendapatkan fasilitas berupa tempat berlindung, makanan, dan barang bantuan kemanusiaan yang penting lainnya. Melalui mitra UNHCR, dilakukan pemeriksaan medis dan gizi para pengungsi tersebut beserta dengan bantuan kesehatan mental dan psikososial.

Hubungan kemitraan UNHCR dengan *Government of Ethiopia* (GoE) juga menyediakan layanan pendidikan kepada para pengungsi yang terdampak konflik. Pada akhir tahun 2021, sebanyak 171.447 siswa terdaftar, 52.486 di tingkat pendidikan taman kanak-kanak, 102.383 di tingkat pendidikan dasar, dan 16.578 di tingkat pendidikan menengah. Program beasiswa atas kerja sama

pemerintah Ethiopia dan Jerman membawa 1.527 pengungsi terdaftar di berbagai perguruan tinggi umum di Ethiopia di bawah program beasiswa DAFI.¹⁷

Akses layanan kesehatan pengungsi difasilitasi oleh UNHCR bersama pemerintah Ethiopia dan mitranya, termasuk perawatan darurat, primer, sekunder, dan tersier. Pasien yang membutuhkan perawatan medis lanjutan dirujuk ke lembaga kesehatan regional atau federal, tetapi perawatan kesehatan primer sering diberikan langsung di dalam kamp-kamp pengungsi. Di daerah perkotaan seperti Addis Ababa, UNHCR mencakup biaya pemeriksaan medis dan obat resep untuk pengungsi.

Di kamp pengungsi dan wilayah tempat pengungsi tinggal, UNHCR mengembangkan program untuk membantu mencegah dan mengurangi efek dari virus Covid-19. Upaya untuk meningkatkan layanan kesehatan termasuk komunikasi risiko, keterlibatan masyarakat, pelatihan tenaga kesehatan, identifikasi dan manajemen kasus, pelacakan dan rujukan kontak, distribusi alat pelindung diri (APD), obat-obatan, dan peralatan yang diperlukan. UNHCR juga merupakan bagian dari respon antar lembaga PBB terhadap krisis IDP terkait Covid-19 dengan menyediakan APD, perlengkapan sanitasi, pusat isolasi dan karantina, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pandemi.

¹⁷ UNHCR, *Fact Sheet: Ethiopia, December 2021* (UNHCR, December 2021), accessed June 8, 2024 <https://data2.unhcr.org/en/documents/details/73572>.

Melalui inisiatif pencegahan dan pengobatan, UNHCR dan RRS terus bekerja sama dengan mitra untuk meningkatkan status gizi pengungsi. Total 22 dari 24 kamp pengungsi dan 46 dari 48 pusat gizi bertahan dioperasikan. Untuk memerangi malnutrisi dan mengatasi peningkatan kebutuhan makan, lebih dari 100.000 anak dan 32.000 wanita menyusui telah terdaftar di Blanket Supplementary Feeding Programs (BSFP). Sepanjang tahun, 32.945 anak usia 5-59 bulan dirawat melalui program Manajemen Masyarakat Malnutrisi Akut (CMAM).

b. Kerjasama Non-Pemerintah

UNHCR tidak mendasarkan respon atas bantuannya kepada pengungsi internal Ethiopia kepada kebijakan dan rencana tertentu. Prioritas utama *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) adalah bekerja melalui respons antar lembaga. Sebaliknya, untuk memetakan dan mencatat pengungsi internal, UNHCR bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi lokal seperti *Norwegian Refugee Council* (NRC), *Bureau of Labour and Social Affairs* (BoLSA), *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA), *Innovative Humanitarian Solutions* (IHS) dan lain sebagainya.¹⁸

Dari sekitar 5.000 kamp yang

direncanakan, UNCHR dan Dewan Pengungsi Norwegia (NRC) telah mendirikan lebih dari 3.000 tempat penampungan darurat di Kamp Rakuba. Hingga saat ini, mereka juga telah mendirikan sekitar 2.500 kamp di Tunaydbah. Selain itu, UNCHR membangun sepuluh *durable shelters* atau penampungan tahan lama di Rakuba berdasarkan kerja samanya dengan NRC.

Tujuannya adalah untuk mempercepat transisi ke perumahan jangka panjang dengan mengarahkan pengungsi untuk menggunakan pendekatan berbasis masyarakat untuk mengajarkan keterampilan yang baru saja mereka pelajari kepada individu lain yang mengungsi secara internal. Selain itu, Balai Rubb di Tunaydbah yang direnovasi saat ini berfungsi sebagai pusat distribusi dan penyimpanan mitra operasional.

Kemitraan ini melibatkan latihan pemecahan masalah, diskusi tentang penempatan pengungsi, dan mencatat kebutuhan pengungsi internal. UNHCR dan mitranya berusaha untuk mengatasi tantangan untuk memastikan bantuan mencapai pengungsi internal di berbagai daerah.

UNHCR dan mitranya berfungsi sebagai *problem solving* dengan memfasilitasi layanan di wilayah Ethiopia kepada pengungsi internal (IDP) terdampak konflik Ethiopia-Tigray. Sebagian besar penyelesaian masalah UNHCR mengatasi tantangan yang berhubungan dengan pengungsi

¹⁸ Aos Yuli Firdaus dan Dinda Widiastuti, "The Role of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Ethiopian Refugees During the Ethiopia-Tigray Conflict from 2018 to 2021," *Journal of Social Political Sciences* 4, no. 4 (2023): 417.

internal melalui kerja sama mitra untuk menyediakan tempat berlindung pengungsi, mengumpulkan data pengungsi internal yang baru tiba serta informasi berdasarkan kebutuhan pengungsi.

Layanan ini dianggap sebagai pemecahan masalah karena staf secara berinteraksi berkelanjutan dengan pengungsi dan fokus pada kategorisasi bantuan. Tindakan lain diambil seperti melatih relawan dan staf dalam penyediaan perlindungan bagi anak-anak IDP terlantar.

Kolaborasi antara RRP Ethiopia dan lima puluh tujuh organisasi kemanusiaan dilakukan demi memperkuat respon kemanusiaan multi-partner. UNHCR akan memberikan pembaharuan terkait perkembangan signifikan terkait pengungsi hingga pembangunan selanjutnya bagian dari *Humanitarian Country Team* (HCT) dan *United Nations Country Team* (UNCT).

UNHCR dan *Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus* (EECMY) telah membentuk kemitraan di wilayah Afar untuk mendukung upaya kemanusiaan bagi pengungsi internal. Berdasarkan kesepakatannya, EECMY memulai diskusi mengenai pelaksanaan dan koordinasi program tingkat daerah dan merekrut pekerja sosial masyarakat.

UNHCR juga bekerja sama dengan *Development Expertise Centre* (DEC), *Innovative Humanitarian Solutions* (IHS), dan

Action for the Needy in Ethiopia (ANE), mendirikan 150 situs perlindungan di Seba Kare untuk pengungsi internal.

ANE merupakan salah satu mitra *Camp Coordination and Camp Management* (CCCM) UNHCR Organisasi Pelayanan Sosial, Kesehatan dan Pembangunan (OSSHD) yang mengerahkan tim CCCM ke berbagai situs pengungsi internal di Mekelle, Axum, Adwa, Sheraro, Adigrat, dan Abi Adi. Ekspedisi bersama untuk mengevaluasi situs IDP di beberapa wilayah distrik Woredas serta melakukan diskusi dengan otoritas zona tersebut.¹⁹

Selain mengkoordinasikan kegiatan dan menawarkan bantuan teknis, UNHCR juga berupaya memperluas ketersediaan pasokan lampu surya, kayu bakar atau arang untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar memasak pengungsi internal. Bekerja sama dengan mitra ANE, UNHCR untuk mempromosikan kegiatan berbasis komunitas IDP di berbagai daerah dalam pengelolaan limbah, pemeliharaan fasilitas sanitasi, dan menyelenggarakan pelatihan di Mekelle.

Delapan dapur umum disediakan oleh ANE pada situs pengungsi internal di Shire pada September 2021. Tak hanya itu, pengerjaan *ground levelling* dan pembaruan akses jalan telah dimulai. Sepuluh truk telah dialokasikan untuk proyek perbaikan lokasi telah dialokasikan

¹⁹ UNHCR, *Ethiopia Operation: Tigray Situation Update* (6 September 2021).

ke lokasi IDP Tsehaye dan lima belas truk ke lokasi Fre Swuat.

Berdasarkan *Global Refugee Forum* (GRF) dan *Global Refugee Forum* (GRF) pada tahun 2019, untuk memastikan anak-anak pengungsi menerima kesepakatan yang adil, maka UNHCR dan UNICEF berkolaborasi dalam kerja sama “*Blueprint*”. Tujuan utama *Blueprint* adalah memasukkan anak-anak pengungsi ke dalam sistem perlindungan anak nasional, memperkuat mekanisme perlindungan anak, khususnya pencatatan kelahiran dan meningkatkan kapasitas entitas nasional untuk perlindungan pengungsi.

UNCHR bekerja sama dengan *Protection from Sexual Exploitation and Abuse* (PSEA) untuk menargetkan empat puluh jaringan perlindungan berbasis masyarakat dengan workshop yang akan ditempatkan di pemukiman Tunaydbah. Selain menegaskan kembali kebijakan nol toleransi UNCHR, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan pengungsi tentang eksploitasi seksual dan penyalahgunaan, termasuk di mana dan bagaimana melaporkan peristiwa tersebut.

Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai Organisasi Internasional Terhadap Penanganan Pengungsi Internal Ethiopia

c. *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai Aktor

United High Commissioner for Refugees (UNHCR) sebagai aktor independen menangani krisis pengungsi internal Ethiopia berfungsi sebagai entitas dengan kepentingan dan agenda tersendiri. Selain menjalankan arahan dari anggota PBB lainnya, UNHCR mengambil inisiatif dan membuat keputusan sesuai dengan nilai, misi, dan prinsip kemanusiaan.

Pada 21 April 2021, UNHCR mengeluarkan laporan status tentang langkah-langkah perlindungan untuk 6.780 rumah tangga di SMA Shiraro dan Universitas Shiraro. Tercatat bahwa minimal 8.000 pengungsi internal terdaftar di UNHCR untuk menerima Core Relief Items (CRI) di domain penampungan dan non-makanan, meskipun lokasi distribusi yang tepat tidak dirinci.

Situs baru untuk pengungsi internal (IDP) di Mekelle dengan kapasitas penampungan 10.000 orang dibentuk dan diantisipasi bahwa 7.000 sampai 8.000 pengungsi dapat dialokasikan kesana sebelum Juni. UNHCR menghubungi *Bureau of Labour and Social Affairs* (BoLSA) demi meminta bantuan dalam mengidentifikasi keluarga dan individu yang berisiko terhadap perpindahan ke lokasi baru di Mekelle.²⁰

²⁰ UNHCR, *Tigray Operation: Tigray Situation Update*. (15 April 2024), <https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Ethiopia%20Tigray%20update-15%20April%202021.pdf>.

Pada Mei 2021, Divisi Perlindungan Internasional melakukan misi, yang mengarah pada rekomendasi tiga intervensi perlindungan utama, yaitu pendaftaran IDP, memperkenalkan pendanaan kegiatan penampungan dan memperluas *protection desk* untuk skala bantuan perlindungan pengungsi. Ketegangan di pusat-pusat perpindahan Ethiopia meningkat ketika konflik berkembang dengan operasi militer Tigrayan pada bulan Juni untuk merebut kembali Mekelle dan kota-kota lainnya.

UNHCR dipandang sebagai aktor yang berkontribusi secara konsisten dalam koordinasi subnasionalnya bersama *Ethiopia Disaster Risk Management* (sebelumnya *National Disaster Risk Management Commission*). Untuk mendukung respons terkoordinasi antar lembaga terhadap pengembalian pengungsi internal, organisasi juga menyiapkan *Return Working Group* di bawah Klaster Perlindungan, membentuk *Return Action Plan* dan lokakarya konsultasi pengembalian pengungsi. Gerakan CCCM memainkan peran penting dalam keterlibatan penanganan pengungsi internal, komunitas lokal dan otoritas setempat untuk menemukan solusi terbaik pengungsi.

UNHCR memegang peranan penting dari upaya penyelesaian konflik dengan menggunakan norma dan nilai bersama untuk menumbuhkan perdamaian antara pihak-pihak yang bertentangan. Sebagai organisasi kemanusiaan, UNHCR memprioritaskan pemenuhan

kebutuhan pengungsi internal Ethiopia dengan memindahkan tempat penampungan, mengantarkan *Core Relief Items* (CRI), dan memberikan bantuan kemanusiaan, yang mencakup kebutuhan hidup sehari-hari seperti barang non-makanan.

UNHCR memiliki tanggung jawab akhir dalam perannya sebagai aktor operasional, secara langsung menggunakan implementasinya pada sebagian besar kegiatan bantuan untuk IDP Konflik Ethiopia-Tigray. Melalui *Enhancing Community-Based Protection Monitoring* (CBPM) dan pembangunan 64 *protection desks*, UNHCR memperbaiki kualitas bantuan serta perlindungan lebih dari dua juta pengungsi internal termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, remaja, orang tua, wanita hamil, wanita beresiko, dan korban penyiksaan. *Emergency Shelter/Core Relief Items* (ES/CRI) dirintiskan pertama oleh UNHCR sekaligus sebagai pemasok utama yang berhasil menumbuhkan kepercayaan otoritas lokal dan masyarakat.

Para pengungsi internal difasilitasi oleh UNHCR terkait pengembalian dan relokasi sukarela. Selain itu, dibentuk *Return Working Group*, *Return Action Plan* dan lokakarya konsultasi pengembalian untuk mendukung para pengungsi yang kembali. UNHCR mencari kesempatan di dalam *Humanitarian Development and Peace* (HDP) dengan bekerja sama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Afrika untuk membantu IDP, memasukkan pengungsi dan IDP ke dalam tiga inisiatif pembangunan,

mengembangkan kemandirian pengungsi dan ketahanan diri di wilayah Amhara.

Konflik Ethiopia-Tigray yang sedang berlangsung dan fakta bahwa lokasi dan kondisi pengembalian dianggap berisiko membuat bantuan UNHCR untuk pengembalian IDP skala besar sulit untuk dilaksanakan dan berakhir dibatasi dalam skala aman. UNHCR juga menghadapi tantangan dalam menemukan solusi berkelanjutan bagi pengungsi Eritrea yang berada di daerah Ethiopia Utara dan memindahkan mereka ke daerah aman selain Tigray.

SIMPULAN

UNHCR memenuhi tanggung jawab dan tujuan organisasi internasional dengan bekerja untuk melindungi orang-orang yang berada dalam bahaya karena keadaan di negara asal mereka atau tempat asal mereka yang memaksa mereka untuk melarikan diri. Salah satu aspek untuk memenuhi tugas-tugas ini adalah mengatasi krisis pengungsi konflik di Tigray, Ethiopia. Intervensi konflik oleh UNHCR sangat penting dalam meredakan situasi khususnya dalam melindungi orang-orang yang terdampak dan menderita karena konflik Ethiopia-Tigray.

UNHCR dengan demikian perlu penilaian upaya dalam memenuhi perannya dalam penanganan pengungsi konflik Ethiopia-Tigray. Sebagai salah satu organisasi internasional, UNHCR memenuhi perannya sebagai aktor independen, UNHCR tidak hanya berfungsi sebagai sekutu bagi negara-negara PBB, tetapi juga mengembangkan dan

melaksanakan strategi pencegahan dan solusi untuk krisis internal, mengatasi berbagai tantangan seperti kondisi pangan yang tidak stabil dan sumber daya yang terbatas. UNHCR memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pengungsi internal Ethiopia dengan memindahkan tempat penampungan, mengantarkan Core Relief Items (CRI), dan memberikan bantuan kemanusiaan, yang mencakup kebutuhan hidup sehari-hari seperti barang non-makanan. UNHCR memiliki tanggung jawab akhir dalam perannya sebagai aktor operasional, secara langsung menggunakan implementasinya pada sebagian besar kegiatan bantuan untuk IDP Konflik Ethiopia-Tigray.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Luar Negeri Indonesia. "Ethiopia." <https://kemlu.go.id/addisababa/id/pages/ethiopia/62/etc-menu>.
- Berhe, Aregawi. *A Political History of the Tigray People's Liberation Front (1975-1991)*. Amsterdam: Tsehai Publishers & Distributors, 2009.
- Makonye, Felix. "The Federal Democratic Republic of Ethiopia's War with the Tigray Region: History, Causes of War, Humanitarian Crisis and Mitigation Measures to Stem Conflict." *Journal of Nations-building & Policy Studies* (JoNPS) 6, no. 1 (2022): 73-86.
- Grindneff, Matina Stevis. "Nobel Peace Prize Awarded to Abiy Ahmed, Ethiopian Prime Minister." *New York Times*,

- <https://www.nytimes.com/2019/10/11/world/africa/nobel-peace-prize.html>.
- Blancard, Lauren Ploch. *Ethiopia's Transition and the Tigray Conflict* (Report No. R46905), Congressional Research Service, 2021.
- Sari, Venisa Yunita et al. "Implementasi Rezim Internasional dalam Menangani Conflict-Related Sexual Violence di Tigray." *Intermestic: Journal of International Studies* 7, no. 1 (2022): 154-180.
- Burgess, Kyana. "Intent and Impact: How State and International Policy Affects Internally Displaced Person in African Countries." *Spectrum* 10, no. 1 (2021): 1-14.
- Blancard, Lauren Ploch. *The Unfolding Conflict in Ethiopia* (Report No. TE10058), Congressional Research Service, 2020.
- UNHCR. "Tigray Situation Update," 2021.
- OCHA, "Ethiopia-Tigray Region Humanitarian Update," 2021.
- Forsen, Thea. "Protest and Political Change in Ethiopia: The Initial Success of the Oromo Qeerroo Youth Movement." *Nordic Journal of African Studies* 30, no. 4 (2021): 1-19.
- Dugis, Vinsensio. *Teori Hubungan Internasional*. Surabaya: Cakra Global Strategis, 2016.
- Mas'oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Archer, Clive. *International Organizations*, 3rd ed. London: Routledge, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- UNHCR and Refugees and Returnees Service (RRS). *Ethiopia Country Refugee Response Plan, January – December, 2023*.
- UNHCR. "Fact Sheet: Ethiopia, December 2021." (UNHCR, December 2021), *UNHCR* <https://data2.unhcr.org/en/documents/details/73572>.
- Firdaus, Aos Yuli dan Dinda Widiastuti. "The Role of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Ethiopian Refugees During the Ethiopia-Tigray Conflict from 2018 to 2021." *Journal of Social Political Sciences* 4, no. 4 (2023): 410-420.
- UNHCR. *Ethiopia Operation: Tigray Situation Update*. (6 September 2021).
- UNHCR. *Tigray Operation: Tigray Situation Update*. (15 April 2024),